

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pertama, Penelitian (Asifa, 2021) yang berjudul Peranan Majalah Suara Aisyiyah (SA) dalam Pergerakan Perempuan Islam Berkemajuan Tahun 1998-1999. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Peranan SA dalam pergerakan perempuan islam berkemajuan pada tahun 1998-1999 ketika saat itu terjadi transisi dari Orde Baru ke reformasi meninggalkan warisan Tulisa-tulisan yang menjadi bukti sejarah perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi kaumnya, di saat berada dalam situasi yang krisis pada saat itu, dari krisis ekonomi, krisis moral, krisis politik sampai dengan krisis kepercayaan.

Peranan yang dilakukan SA dalam pemberdayaan perempuan dengan menjadikan perempuan sebagai bagian dari pembangunan nasional yakni dengan cara memberdayakan dan memfasilitasi Pendidikan bagi perempuan. SA mengangkat banyak tokoh muslimah perempuan yang mampu memperlihatkan pengabdian dan prestasinya untuk perubahan dunia yang lebih baik dan berkeadilan. SA melakukan pemberian pemahaman bahwa islam begitu menghormati dan memuliakan kedudukan perempuan sebagai manusia yang sejajar dengan laki-laki, merdeka dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki sesuai konsep khalifah fil-ardh (pemimpin di muka bumi). SA memberikan kesadaran bahwa pergerakan perempuan tidak hanya aksi turun ke jalan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan bahwa Aisyiyah merumuskan strategi

untuk memajukan perempuan melalui pemberian pemahaman. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini lebih terfokus pada peranan majalah suara Aisyiyah pada tahun 1998-1999.

Kedua, penelitian (Karomatika, 2018) yang berjudul Kontribusi Aisyiyah dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada Tahun 1928. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Aisyiyah memiliki peran dan sumbangsi dalam kongres perempuan indonesia pertama kali, yakni pada saat itu aisyiyah terlibat dengan memberikan suatu gagasan terkait Pendidikan untuk perempuan. Maupun memberikan tanggapan mengenai isu kedudukan perempuan di dalam pernikahan yang menjadi pembahasan dalam kongres. Aisyiyah berlandaskan agama dengan menggunakan tafsir berkemajuan. Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu Aisyiyah menerapkan gagasan risalah perempuan berkemajuan dengan tetap berpegang teguh pada nilai agama untuk menanggapi kondisi perempuan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah lebih terfokus pada kontribusi Aisyiyah pada saat itu dalam kongres perempuan pertama di Indonesia.

Ketiga, Penelitian (Adinda, 2021) yang berjudul Kontribusi Aisyiyah dalam Gerakan Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Aisyiyah merupakan organisasi perempuan yang didirikan oleh Muhammadiyah sebagai jawaban atas pentingnya peranan perempuan dalam aspek sosial kemasyarakatan. Orientasi aisyiyah pada saat itu adalah gerakan aisyiyah yang menyoal stigma keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang seperti Pendidikan, keagamaan dan sosial di tengah-tengah dominasi patriarki di era penjajahan. Sebagai tindak

lanjut perjuangan aisyiyah pada saat itu meliputi : memberikan kontribusi berupa pengedukasian keseimbangan peran perempuan di dalam rumah tangga dan ranah sosial. Dalam penelitian ini memiliki persamaan bahwa Aisyiyah menerapkan Risalah Perempuan Berkemajuan dalam meningkatkan Kesejahteraan Perempuan sedangkan perbedaan penelitian ini lebih terfokus pada kontribusi Aisyiyah dalam melakukan Gerakan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta.

Keempat, penelitian (Aeni, 2022) yang berjudul Gagasan Perempuan Berkemajuan (Studi Kesetaraan Gender pada Organisasi Aisyiyah). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa aisyiyah mengusahakan terwujudnya perempuan berkemajuan dengan mendukung terciptanya kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan. Aisyiyah pun memberikab edukasi mengenai pentingnya menciptakan suasana dalam hubungan rumah tangga yang sinergis dan adil. Mengusahakan pembangunan Lembaga Pendidikan yang terbuka bagi semua kalangan. Serta mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas UMKM secara nasional serta membantu perempuan Aisyiyah agar dapat berkarir dengan memberikan pelatihan (BUEKA). Mendukung serta memberikan wawasan kepada perempuan dengan membuka sarana bantuan hukum (POSBAKUM). Penelitian ini memiliki persamaan bahwa Aisyiyah melakukan strategi dalam penerapan risalah perempuan berkemajuan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih terfokus pada kesetaraan gender yang menjadi fokus di Aisyiyah.

Kelima, Penelitian (Roisatul, 2016) Gagasan dan Gerakan Feminisme Islam R.A Kartini (1891-1901). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Kedudukan seorang perempuan Jawa sebelum adanya R.A Kartini sangat

memprihatinkan bahwa seorang perempuan tidak mempunyai hak apapun, mereka terkungkung karena adanya sebuah adat yang membelenggu mereka, perempuan pada zaman itu tidaksama sekali mengenyam sebuah pendidikan. (2) Pemikiran feminisme Kartini dipengaruhi oleh wacana Islam dapat di buktikan dalam sebuah surat-suratnya bahwa ia melakukan sebuah dobrakan tentang relasi perempuan, tetap dengan cara Islam yang menyesuaikan fitrah seorang perempuan. (3) Pemikiran dan gerakan Kartini yang ingin menjunjung derajat seorang perempuan melalui sebuah pembaharuan pemikiran melalui sebuah pendidikan. Dia merupakan tokoh feminisme liberal yang ingin mendobrak sebuah pemikiran perempuan Jawa tentang adat istiadat yang dapat membelenggu mereka dalam sebuah kebodohan. Kartini juga memberikan banyak sebuah pencerahan tentang hak perempuan sesuai dengan peraturan Islam yang sebenarnya melalui surat-suratnya. Seperti yang dikatakan oleh Fatimah Mernissi tentang relasi antara lelaki dan perempuan di dalam Islam. Pada dasarnya kemitrasejahteraan antara laki-laki dan perempuan telah tercantum di dalam Al Qur'an yang berbanding balik dengan fenomena perempuan di Jawa yang mengalami sebuah keterpurukan. Persamaan dalam penelitian adalah gagasan dan pemikiran kartini termasuk pada gagasan perempuan berkemajuan. Sedangkan perbedaan penelitian ini lebih terfokus pada Gagasan dan Gerakan Feminisme Islam R.A Kartini (1891-1901).

## **B. Konsep Gerakan Sosial**

### **a. Pengertian Gerakan Sosial**

Macdonis menjelaskan bahwa gerakan sosial adalah aktivitas terorganisir yang bertujuan untuk mendorong atau menghambat

perubahan sosial. Dari definisi ini, terdapat dua ciri utama dalam gerakan sosial, yaitu adanya aktivitas yang terorganisir dan adanya tujuan yang berkaitan dengan perubahan sosial.

Sementara itu, Locher berpendapat bahwa ketika sekelompok orang mengatur diri untuk mendorong atau menolak suatu perubahan sosial, mereka sedang menciptakan gerakan sosial. Individu-individu yang terlibat dalam gerakan tersebut, dengan berbagai tingkat kekuatan politik yang dimiliki, bergabung untuk memperjuangkan perubahan sosial tertentu. Menurut Locher, banyak teoritis perilaku kolektif melihat gerakan sosial sebagai bagian dari perilaku kolektif, namun sebagian besar teoritis gerakan sosial menganggapnya sebagai fenomena yang terpisah dari perilaku kolektif.

Sujatmiko menjelaskan bahwa gerakan sosial merupakan bentuk aksi kolektif yang memiliki orientasi konflik yang jelas terhadap kelompok sosial dan politik tertentu. Aksi ini dilakukan dalam konteks jaringan antar lembaga yang erat, dengan para pelaku yang terikat oleh rasa solidaritas dan identitas kolektif yang kuat, yang melampaui ikatan-ikatan dalam koalisi atau kampanye bersama.

#### **b. Gerakan Sosial Baru**

Teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movements) adalah pendekatan teoritis yang mengungkapkan perubahan karakter gerakan sosial. Teori ini menekankan ciri khas gerakan sosial dalam masyarakat pasca-industri (post-industrial) di Amerika Utara dan Eropa Barat. Teori Gerakan Sosial Baru (GSB) berakar dari tradisi filsafat politik dan teori sosial Eropa kontinental. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap

kelemahan marxisme klasik dalam menganalisis perilaku kolektif (collective behavior).

Meskipun istilah teori Gerakan Sosial Baru (New Social Movements) telah diterima secara luas, terdapat berbagai pandangan yang berbeda di kalangan para teoritis. Beberapa pandangan tersebut dapat dikelompokkan dalam pendekatan umum mengenai konsep Gerakan Sosial Baru, sebagai berikut. Pertama, teori Gerakan Sosial Baru umumnya menyoroti tindakan simbolik dalam masyarakat sipil atau budaya sebagai arena untuk tindakan kolektif, selain tindakan instrumental dalam konteks politik atau negara. Kedua, para teoritis Gerakan Sosial Baru menekankan pentingnya proses yang mendorong otonomi dan penentuan nasib sendiri, bukan sekadar strategi untuk memaksimalkan pengaruh dan kekuasaan. Ketiga, beberapa teoritis Gerakan Sosial Baru fokus pada peran nilai-nilai pasca-materialis dalam banyak tindakan kolektif kontemporer, yang berlawanan dengan konflik atas sumber daya material. Keempat, teoritis Gerakan Sosial Baru cenderung mempertanyakan proses yang rapuh dalam pembentukan identitas kolektif dan pengidentifikasian kelompok kepentingan, alih-alih berasumsi bahwa konflik antar kelompok dan kepentingan mereka ditentukan secara struktural. Kelima, teori Gerakan Sosial Baru menekankan konstruksi sosial dari ketidakpuasan dan ideologi, daripada berasumsi bahwa keduanya dapat disimpulkan dari posisi struktural kelompok. Terakhir, teori Gerakan Sosial Baru mengakui adanya jaringan yang tersembunyi, laten, dan temporal yang sering mendasari tindakan kolektif, daripada melihat organisasi yang terpusat sebagai prasyarat keberhasilan

mobilisasi.

### **c. Karakteristik Gerakan Sosial Baru**

Menurut Pichardo, Paradigma Gerakan Sosial Baru secara fundamental memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan paradigma Gerakan Sosial Lama (Old Social Movements). Karakteristik khusus dari Gerakan Sosial Baru (GSB) dapat dilihat dari empat aspek :

- (1) Ideology and Goals (Tujuan dan Idiologi)
- (2) Tactics (Taktik)
- (3) Structure (Struktur)
- (4) Participants of Contemporary movements (Partisipan dari Gerakan Kontemporer) (Sukmana, 2016).

## **A. Ketidakadilan Gender**

### **a. Pengertian Ketidakadilan Gender**

Ketidakadilan gender merujuk pada kondisi di mana terdapat perlakuan yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki. Hal ini mencakup ketidaksetaraan dalam hak, kesempatan, perlindungan, dan kewajiban di berbagai bidang kehidupan. Menurut Hasan (2019), ketidakadilan gender pada dasarnya menimbulkan berbagai perlakuan tidak adil terhadap perempuan, seperti stereotip negatif, pengabaian terhadap suara perempuan, hingga penyepelan atau pembiaran terhadap masalah kekerasan (terutama kekerasan simbolik) yang dialami perempuan. Ketidakadilan gender dapat berupa subordinasi, marginalisasi, stereotip, kekerasan terhadap perempuan, dan beban kerja ganda. Semua bentuk ketidakadilan ini saling berkaitan dan saling memengaruhi.

### **b. Bentuk-Bentuk Ketidakadilan Gender**

#### **(1) Gender dan Marginalisasi Perempuan**

Proses marginalisasi, yang mengarah pada kemiskinan, sebenarnya sering terjadi dalam masyarakat dan negara, mempengaruhi baik laki-laki maupun perempuan, dan disebabkan oleh berbagai faktor seperti penggusuran, bencana alam, atau eksploitasi. Namun, terdapat suatu bentuk pemiskinan yang terjadi pada salah satu jenis kelamin, dalam hal ini perempuan, yang disebabkan oleh perbedaan gender. Ada berbagai perbedaan dalam jenis, bentuk, tempat, waktu, dan mekanisme proses marginalisasi perempuan akibat perbedaan gender ini. Sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, interpretasi agama, tradisi, kebiasaan, atau bahkan asumsi dalam ilmu pengetahuan.

Berbagai penelitian yang telah dilakukan untuk membahas program pembangunan pemerintah yang menjadi penyebab kemiskinan di kalangan perempuan. Sebagai contoh, program swasembada pangan atau revolusi hijau (green revolution) secara ekonomi telah mengusir perempuan dari pekerjaan mereka, sehingga menyebabkan kemiskinan. Di Jawa, program revolusi hijau yang memperkenalkan jenis padi unggul dengan batang yang lebih pendek serta pendekatan panen menggunakan sistem tebang dengan sabit, menghilangkan kemungkinan panen dengan cara menyiangi padi menggunakan nni-ani, yang sebelumnya merupakan alat yang biasa digunakan oleh perempuan. Akibatnya, banyak perempuan miskin di pedesaan yang semakin termarginalisasi, menjadi lebih miskin dan terpinggirkan karena tidak dapat bekerja di sawah saat musim panen. Hal ini menunjukkan bahwa program revolusi hijau tersebut dirancang tanpa mempertimbangkan faktor gender.

Marginalisasi perempuan tidak hanya terjadi di tempat kerja, tetapi juga dalam ranah rumah tangga, masyarakat, budaya, dan bahkan negara.

Diskriminasi terhadap perempuan dimulai sejak dalam keluarga, di mana sering kali ada perbedaan perlakuan antara anggota keluarga laki-laki dan perempuan. Marginalisasi ini juga diperkuat oleh adat istiadat dan tafsiran agama. Sebagai contoh, beberapa suku di Indonesia tidak memberikan hak waris yang sama kepada perempuan, bahkan ada tafsiran agama yang hanya memberikan hak waris perempuan setengah dari hak yang diberikan kepada laki-laki.

### **(2) Subordinasi**

Pandangan gender dapat menyebabkan subordinasi terhadap perempuan. Pemikiran yang menganggap perempuan sebagai sosok yang irrasional atau emosional, yang dianggap tidak mampu menjadi pemimpin, berujung pada munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Subordinasi berdasarkan gender ini muncul dalam berbagai bentuk yang berbeda, tergantung pada tempat dan waktu. Di Jawa, dahulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu menempuh pendidikan tinggi, karena pada akhirnya mereka akan tetap kembali ke urusan rumah tangga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki kebijakan yang memungkinkan suami untuk memutuskan sendiri jika ingin belajar jauh dari keluarga, sementara istri yang ingin belajar di luar negeri harus mendapatkan izin dari suami. Dalam kehidupan rumah tangga, seringkali terdengar bahwa ketika keuangan keluarga terbatas dan harus memutuskan untuk menyekolahkan anak-anak, anak laki-laki akan diprioritaskan. Praktik semacam ini sebenarnya berasal dari kesadaran gender yang tidak adil.

### **(3) Stereotype**

Secara umum, stereotype adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Sayangnya, stereotype sering kali merugikan dan

menyebabkan ketidakadilan. Penandaan yang diberikan pada kelompok etnis tertentu, seperti Yahudi di Barat atau Cina di Asia Tenggara, telah menimbulkan kerugian bagi kelompok tersebut. Salah satu bentuk stereotipe adalah yang berasal dari pandangan gender. Banyak ketidakadilan yang dialami oleh kelompok gender tertentu, terutama perempuan, yang berakar dari penandaan yang diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, asumsi bahwa perempuan yang berdandan berusaha menarik perhatian lawan jenis sering kali dikaitkan dengan kasus kekerasan atau pelecehan seksual, yang memperkuat stereotipe negatif tersebut.

Bahkan, ketika perempuan menjadi korban pemerkosaan, masyarakat cenderung menyalahkan mereka. Ada anggapan yang berkembang bahwa tugas utama perempuan adalah melayani suami. Stereotipe ini menyebabkan pendidikan perempuan sering dianggap kurang penting. Penilaian negatif terhadap perempuan ini terjadi di berbagai tempat. Banyak peraturan pemerintah, norma agama, budaya, dan kebiasaan masyarakat yang muncul dan berkembang akibat adanya stereotipe tersebut.

### **c. Kekerasan**

Kekerasan (violence) merujuk pada serangan atau pelanggaran terhadap fisik maupun integritas mental dan psikologis seseorang. Kekerasan antar sesama manusia pada umumnya berasal dari berbagai sumber, namun kekerasan terhadap salah satu jenis kelamin tertentu sering kali disebabkan oleh pandangan gender. Kekerasan yang timbul akibat bias gender ini disebut sebagai kekerasan terkait gender (gender-related violence). Pada dasarnya, kekerasan gender muncul akibat ketidaksetaraan kekuasaan yang ada dalam masyarakat (Fakih, 2024).

## **B. Konsep Pemberdayaan**

### **a. Pengertian Pemberdayaan**

Secara etimologi, pemberdayaan berasal dari kata "daya" memiliki arti kekuatan atau kapasitas. Berdasarkan pemahaman ini, pemberdayaan bisa diartikan sebagai suatu upaya untuk memperkuat, atau sebagai metode untuk memperoleh kekuatan/kemampuan, serta cara-cara yang diberikan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang lebih lemah atau belum memiliki kekuatan.

Menurut Edi Suharto (2010), pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) berasal dari kata "power" yang berarti kekuasaan atau kemampuan. Oleh karena itu, konsep awal pemberdayaan sangat terkait dengan ide kekuasaan, yang merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu sesuai keinginan, tanpa memperhatikan harapan atau kepentingan masyarakat. Dalam ilmu sosial tradisional, kekuasaan sering dianggap berhubungan erat dengan pengaruh dan kontrol. Kekuasaan dan relasi kekuasaan bisa berubah, sehingga kekuasaan tidak statis dan dapat muncul dalam konteks hubungan sosial. Istilah pemberdayaan itu sendiri diambil dari kata "empowerment" yang pertama kali berkembang di Eropa pada abad pertengahan, dan terus berlanjut hingga akhir 1970-an, 1980-an, dan pertengahan 1990-an.

Konsep pemberdayaan selanjutnya berdampak pada hipotesis yang dibuat. Edi Suharto (2010) Mengenai makna konsep pemberdayaan masyarakat dalam bukunya yang berjudul *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Dimana ia mencirikan pemberdayaan yaitu: "Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk

individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mata pencaharian, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya”.

Edi Suharto (2010) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai Tindakan social dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan Tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social atau memenuhi kebutuhan social sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Menurut Edi Suharto (2010) Pemberdayaan merujuk pada kemampuan setiap individu, dengan fokus pada masyarakat yang rentan dan lemah, untuk memiliki hak istimewa. Artinya, mereka tidak hanya memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, tetapi juga terbebas dari kelaparan dan penderitaan. Pemberdayaan mencakup akses terhadap sumber daya produktif yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan pendapatan, memenuhi kebutuhan mereka, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Menurut Jim Ife, pemberdayaan yaitu memberikan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan kepada warga untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menentukan masa depannya sendiri dan berpartisipasi dalam mempengaruhi kehidupan dari masyarakatnya.

#### **b. Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk membantu individu dan masyarakat mencapai kebebasan. Kebebasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir, bertindak,

dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Selain itu, penting untuk memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan masyarakat yang otonom.

Kemandirian masyarakat merujuk pada kondisi di mana masyarakat memiliki kemampuan untuk berpikir, memilih, dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang dianggap tepat, menggunakan kapasitas yang dimiliki, termasuk aspek kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif, serta mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam lingkungan internal mereka. Oleh karena itu, untuk mencapai kemandirian, masyarakat perlu didukung oleh kemampuan yang mencakup seluruh aspek sumber daya manusia, baik dalam dimensi kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, maupun sumber daya fisik dan material lainnya.

Pemberdayaan bertujuan adalah untuk memperkuat kekuasaan masyarakat, terutama bagi kelompok-kelompok yang lemah dan tidak berdaya, baik karena faktor internal seperti persepsi diri mereka, maupun karena faktor eksternal seperti penindasan yang disebabkan oleh struktur sosial yang tidak adil. Untuk memahami pemberdayaan secara lebih lengkap, penting untuk memahami konsep kelompok lemah dan kondisi ketidakberdayaan yang mereka alami.

## **C. Konsep Feminisme**

### **a. Pengertian Feminisme**

Sebagian masyarakat masih memandang feminisme sebagai gerakan pemberontakan perempuan terhadap laki-laki. Feminisme dianggap sebagai upaya perempuan untuk menentang kodrat atau fitrah mereka, serta melawan konstruksi sosial yang ada. Para feminis menjelaskan bahwa gerakan ini bermula dari kesadaran perempuan akan kondisi mereka yang sering tertindas dan tereksploitasi, sehingga perlu ada usaha untuk mengakhiri keadaan tersebut.

Selain itu, tujuan utama dari gerakan feminisme adalah untuk memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan martabat yang setara antara perempuan dan laki-laki. Dalam buku yang ditulis oleh Lisa Tuttle Encyclopedia of Feminis tahun 1986, feminise berasal dari Bahasa Inggris feminis, yang berasal dari Bahasa Latin femina (woman).

Teori feminisme menekankan pentingnya kesadaran akan hak-hak yang setara antara perempuan dan laki-laki di berbagai bidang. Teori ini berkembang sebagai respons terhadap kecemasan yang muncul di masyarakat, seperti konflik kelas, ras, dan gender. Feminisme berjuang untuk menghapuskan ketegangan antara kelompok yang dianggap lemah dan yang lebih kuat. Secara lebih luas, feminisme menentang ketidakadilan dalam masyarakat patriarki serta menolak filsafat dan sejarah yang selama ini hanya berfokus pada perspektif laki-laki.

Feminisme bukanlah upaya untuk memberontak terhadap laki-laki, bersaing dengan mereka, atau menolak kodrat perempuan, melainkan sebuah usaha untuk mengakhiri penindasan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Dalam hal ini, perjuangan feminisme tidak hanya terbatas pada isu gender, tetapi juga mencakup pembelaan terhadap hak-hak kemanusiaan perempuan.

## **b. Gelombang Feminisme**

### **I. Feminisme Gelombang Pertama**

Adanya Feminisme gelombang pertama dimulai dengan tulisan Mary Wollstonecraft *The Vindication of the Rights of Woman* 1792 yang memberikan seruan pengembangan sisi rasional pada perempuan dan menuntut agar anak perempuan mendapatkan akses untuk dapat belajar di sekolah pemerintah yang bertujuan agar setara dengan anak laki-laki sehingga menjadikan perempuan mandiri secara finansial. Perjuangan Wollstonecraft kemudian dilanjutkan oleh

Harriet dan John Stuart Mill yang mengupayakan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan dan hak-hak legal perempuan dalam rumah tangga seperti pernikahan maupun perceraian. Selain itu juga, muncul perempuan progresif yaitu Caroline Norton. Aktifitas kaum feminis di Inggris ini menyebar juga di Amerika yang mengukir sejarah penting pada Seneca Falls Convention 1948 yang menuntut dihapuskannya semua diskriminasi yang berdasarkan pada jenis kelamin.

Sementara di Inggris, terjadi peningkatan jumlah perempuan yang bekerja menuntut untuk disediakan sekolah yang memberikan pembinaan perempuan dalam persiapan sebagai tenaga kerja profesional, meskipun pada saat itu perempuan masih di domestifikasi. Pada gilirannya, keterlibatan perempuan semakin meluas hingga di ranah Pendidikan memantik dicetuskannya gagasan bahwa perempuan berhak mendapatkan hak pilih. Pada akhirnya hak pilih untuk Perempuan dicapai pada 1918 setelah isu hak pilih Perempuan memuncak pada 1819 saat kata feminis digunakan untuk pertama kalinya dalam Athenaeum.

Pada satu sisi, beberapa pembaharuan paling besar dalam hal kedudukan Perempuan secara sosial dan hukum sebelum akhir abad ke-20 terjadi dalam beberapa decade pada abad ke-19. Sementara pada sisi lain, kebanyakan Perempuan menjadi aktivis sebuah kampanye seperti Caroline Norton, Florence Nightingale, Emily Davies dan Barbara Bodichon yang memiliki pandangan bertentangan terkait tingkah laku yang tidak konvensional. Mereka sangat memperhatikan keadaan intelegensia Perempuan kelas menengah.

Feminisme gelombang pertama melangkah melalui karya-karya individual dengan tujuan khusus. Hingga kemudian, momentum peristiwa-peristiwa tersebut membangkitkan perhatian public terhadap partisipasi penuh

Perempuan dalam kehidupan sosial dan politik dalam dunia perpolitikan secara keseluruhan. Naum dalam hal ini masih kurang dirasakan pada saat itu.

## **II. Feminisme Gelombang Kedua**

Feminisme gelombang kedua dimulai pada tahun 1960 an diawali dengan adanya *The Feminine Mystique*. Yang dilanjutkan dengan berdirinya *National Organization for Woman* dan munculnya kelompok-kelompok *conscious raising (CR)* di akhir tahun 1960 an. Gerakan kolektif yang revolusionis atau *women's liberation* yang diangkat sebagai tema besar feminisme gelombang kedua. Hal ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan Perempuan terhadap diskriminasi yang mereka alami meskipun terdapat emansipasi secara hukum dan politis yang telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama. Sehingga feminisme gelombang kedua lebih terpusat pada isu-isu yang mempengaruhi kehidupan Perempuan secara langsung seperti reproduksi, pengasuhan anak, kekerasan seksual, masalah domestifikasi dan seksualitas Perempuan.

Feminisme gelombang kedua di Amerika dapat dikategorikan menjadi dua aliran. Pertama, kelompok aliran kanan yang cenderung bersifat liberal bertujuan untuk memperjuangkan partisipasi Perempuan dalam berbagai kehidupan sosial. Dengan hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. *NOW (National Organization for Woman)* yang didirikan oleh Betty Freidan pada tahun 1966 membawahi aliran kanan tersebut.

Kedua, aliran kiri yang lebih radikal. Feminisme radikal muncul sebagai reaksi dari para feminis yang merasa tidak mendapatkan perhatian dalam gerakan feminisme liberal *NOW*, disebabkan oleh perbedaan ras, kelas, serta protes terhadap kekejaman yang terjadi di Amerika selama perang Vietnam. Konsep

utama dari feminisme radikal adalah "consciousness raising" dengan prinsip bahwa "the personal is political". Perempuan dipaksa oleh patriarki untuk bersikap tunduk dan lemah. Mereka menentang kontes kecantikan karena dianggap sebagai ajang yang menciptakan standar kecantikan yang justru melemahkan posisi perempuan.

Sementara di Inggris, kelompok kanan tumbuh dikalangan Perempuan pekerja. Mereka melakukan aksi mogok untuk menuntut persamaan upah. Sedangkan kelompok kiri dipengaruhi oleh paham Sosialis Marxisme. Namun pada 1970 dalam The British National Women's Liberation Conference, secara kolektif mereka menuntut persamaan upah, persamaan kesempatan kerja dan Pendidikan, tempat penitipan anak 24 jam, aborsi sesuai kebutuhan dan alat kontrasepsi gratis.

Buku *The Second Sex* (1956) karya Simone de Beauvoir menjadi salah satu dasar utama gerakan feminisme pada tahun 1970-an. Simone menentang pandangan determinisme biologis dalam fisiologi, dorongan bawah sadar dalam psikoanalisis Freud, serta subordinasi ekonomi dalam teori Marx. Teori-teori tersebut dianggap telah memperkuat internalisasi konsep perempuan sebagai "yang lain" (the other) dan membentuk perempuan menjadi wanita melalui konstruksi sosial yang sangat patriarkal. Menurut de Beauvoir, perempuan harus berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang setara dalam bidang sosial dan ekonomi, sehingga dapat menjadi subjek yang sejajar dengan laki-laki.

Di Amerika, pemikiran de Beauvoir dikembangkan oleh Betty Friedan, Shulamith Firestone, dan Kate Millett. Friedan berpendapat bahwa untuk mencapai kesetaraan dengan laki-laki, perempuan harus melepaskan diri dari belenggu rumah tangga dan *feminine mystique* yang menjerat perempuan dalam konstruksi sosial yang menghinakan mereka. Kate Millett mengembangkan kajian tentang film, sastra, dan

budaya untuk melawan penindasan yang terstruktur melalui kontrol ideologis. Sementara itu, Firestone mengikuti pemikiran Marxis dan menyerukan agar perempuan menguasai alat-alat reproduksi. Di Inggris, Juliet Mitchell sependapat bahwa penindasan terhadap perempuan terutama dilakukan secara ideologis melalui psikologi feminitas. Mitchell berargumen bahwa pembebasan perempuan terletak pada penguasaan kontrol terhadap produksi, seksualitas, reproduksi, dan pendidikan anak.

Feminisme gelombang kedua di kritisi oleh para Perempuan pekerja, Perempuan kulit hitam, lesbian yang membentuk gerakan radikal. Banyak yang beranggapan bahwa women's liberation hanya mengutamakan Perempuan kulit putih dan gagal mencakup isu kelas dan ras. Sejak awal berpendapat feminisme selalu dipengaruhi oleh isu mengenai Perempuan Afrika, Asia dan Latina. Kaum lesbian menuduh feminisme gelombang kedua memprioritaskan kaum heteroseksual dan mengesampingkan lesbianism. Membuktikan bahwa feminisme lesbian dan feminisme radikal berkembang secara simultan pada 1960 an hingga 1970 an. Feminisme gelombang kedua berakhir pada 1975 dan pada akhir 1980an, feminisme berkembang kearah feminisme gelombang ketiga dan dan bersamaan dengan lahirnya postfeminisme yang kontroversial.

★ Feminisme gelombang kedua mendapat kritik dari perempuan pekerja, perempuan kulit hitam, dan lesbian yang kemudian membentuk gerakan radikal. Banyak yang berpendapat bahwa gerakan pembebasan perempuan lebih mengutamakan perempuan kulit putih dan gagal menyentuh isu-isu terkait kelas dan ras. Sejak awal, feminisme memang selalu dipengaruhi oleh isu-isu yang melibatkan perempuan Afrika, Asia, dan Latina. Kaum lesbian mengkritik feminisme gelombang kedua yang lebih mengutamakan perempuan heteroseksual dan mengabaikan lesbianisme. Hal ini menunjukkan bahwa feminisme lesbian dan feminisme radikal berkembang

bersamaan pada 1960-an hingga 1970-an. Feminisme gelombang kedua berakhir pada 1975, dan pada akhir 1980-an, feminisme mulai berkembang ke arah feminisme gelombang ketiga, bersamaan dengan munculnya postfeminisme yang kontroversial.

### **III. Feminisme Gelombang Ketiga**

Pada awal 1980-an hingga awal 1990-an, muncul feminisme gelombang ketiga, yang ditandai dengan pemahaman yang semakin beragam terhadap gerakan feminisme. Gerakan politik mulai menonjolkan isu-isu perempuan, ras, identitas, dan posisi subjek, yang sering dipahami dalam konteks "politik postmodern", di mana hal-hal yang sebelumnya terpinggirkan dan termarginalkan mulai mendapat perhatian. Dalam "teori postmodern", kedudukan mereka mulai dihargai dengan menekankan perbedaan mereka dari kelompok dan individu lain.

Teori politik ini menggambarkan "politik identitas" dan "politik perbedaan." Politik ini muncul dalam kategori politik baru, yang mencakup kelompok-kelompok yang sebelumnya diabaikan dalam masyarakat modern, seperti ras, preferensi seksual, gender, identitas, dan politik identitas. Konsep politik baru ini dibangun di atas konstruksi identitas politik dan budaya melalui komitmen dan perjuangan politik. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah identitas, seperti yang dijelaskan oleh Best dan Kellner. Ketegangan ini berawal dari ambiguitas kata "identitas," yang dalam teori postmodern sering memiliki konotasi negatif, karena dianggap mengimplikasikan logika identitas yang represif (berkaitan dengan Hegel dan Marxisme) yang mengubah keberagaman menjadi keseragaman. Di sisi lain, "identitas" juga dapat memiliki konotasi positif karena melibatkan penempatan identitas politik seseorang berdasarkan latar belakang sejarah, budaya, kelas, gender, dan status etnis mereka. Kedua sumber subjektivitas individu dan pengkategorian

politik yang berbeda ini disebut sebagai "posisi subjek."

Pada tahun 1975-1985, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan periode tersebut sebagai Dasawarsa Perempuan dan menyerukan kepada negara-negara anggotanya untuk memberikan perempuan kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam kemajuan di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, agama, dan hukum. Tiga konferensi internasional mengenai perempuan yang diadakan selama dasawarsa ini menandai peringatan tersebut: konferensi pertama diadakan di Mexico City pada 1975, konferensi tengah di Kopenhagen pada 1980, dan konferensi terakhir berlangsung selama 12 hari di Nairobi, Kenya pada 1985.

Gerakan feminisme yang telah berlangsung sejauh ini telah mengembalikan posisi perempuan dalam semangat emansipasi yang tinggi, dengan peraturan yang memberikan ruang bagi perempuan dalam ranah publik, di mana laki-laki dan perempuan "berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah," setelah berabad-abad terpinggirkan dalam setiap aspek kehidupan. Gerakan emansipasi ini memberikan inspirasi besar bagi organisasi perempuan di seluruh dunia, memotivasi mereka untuk memperjuangkan hak-hak sosial dan politik perempuan tanpa mengurangi peran perempuan sesuai dengan kodratnya. Peran politik perempuan dari satu periode perjuangan ke periode berikutnya memiliki tujuan yang berbeda, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing periode perjuangan (Sarah Gamble, 2010).

#### **D. Konsep Kesejahteraan Sosial**

##### **a. Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah konsep yang sangat luas, yang berkaitan dengan kondisi umum yang lebih baik (generasi kesejahteraan) bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat dua dimensi utama dari konsep kesejahteraan sosial, yaitu: (1) bagaimana kebutuhan masyarakat dapat

terpenuhi dengan baik atau memadai, termasuk kebutuhan ekonomi, pendidikan, sosial, dan kesehatan, serta (2) apa yang dapat diperoleh oleh masyarakat melalui program-program, manfaat, dan pelayanan yang tersedia.

Kesejahteraan sosial sebagai sebuah gagasan, yakni gagasan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih layak yang menyediakan kesempatan kerja dan makna kemanusiaan, memberikan keamanan dan perlindungan dari segala ancaman keamanan, mempromosikan keadilan dan adanya jaminan kehidupan ekonomi produktif dan stabil bagi individu.

Menurut Zastrow (2017), tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasi bagi individu-individu dalam masyarakat. Kesejahteraan sosial berupaya meningkatkan fungsi sosial di semua lapisan masyarakat, baik yang kaya maupun yang miskin. Ketika institusi-institusi dalam masyarakat, seperti keluarga dan ekonomi pasar, tidak mampu memenuhi kebutuhan individu atau kelompok, maka layanan sosial menjadi kebutuhan yang sangat mendesak.

Kesejahteraan sosial dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sebagai institusi (institutional) dan sebagai disiplin akademik (academic discipline). Dalam perspektif institusional, The National Association of Social Workers (NASW) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai sebuah sistem nasional yang mencakup program-program, manfaat, dan layanan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, yang merupakan elemen-elemen dasar dalam pemeliharaan masyarakat.

Program kesejahteraan sosial dan organisasi yang menyediakan layanan sosial sering dikenal sebagai institusi kesejahteraan sosial. Tujuan

utama dari institusi ini adalah untuk mencegah, mengurangi, atau membantu mengatasi masalah sosial, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, keluarga, organisasi, dan masyarakat. Institusi kesejahteraan sosial dibentuk berdasarkan kebijakan dan peraturan, baik melalui program dan layanan yang disediakan secara sukarela oleh masyarakat maupun oleh lembaga pemerintah. (Sukmana, 2022).

#### **b. Tujuan Kesejahteraan sosial**

Secara umum, tujuan dari Kesejahteraan Sosial adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan yang layak bagi manusia. Kesejahteraan Sosial memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) Mencapai kehidupan yang sejahtera dengan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, papan, kesehatan, gizi, serta hubungan sosial yang harmonis dengan lingkungan. (2) Mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan standar hidup yang memadai, serta membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar.

#### **c. Bentuk-bentuk kesejahteraan sosial**

Bentuk-bentuk kegiatan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi: (a) Rehabilitasi sosial; (b) Jaminan sosial; (c) Pemberdayaan sosial; dan (d) Perlindungan sosial. Penjelasan berbagai bentuk penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, sebagai berikut:

##### **a. Rehabilitasi sosial**

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan

masyarakat. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan individu yang mengalami disfungsi sosial, agar mereka dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Proses rehabilitasi sosial dilakukan secara persuasif, motivatif, dan koersif, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun panti sosial. Jenis-jenis rehabilitasi sosial meliputi: (1) motivasi dan diagnosis psikososial; (2) perawatan dan pengasuhan; (3) pelatihan keterampilan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; (4) bimbingan mental dan spiritual; (5) bimbingan fisik; (6) bimbingan sosial dan konseling psikososial; (7) pelayanan aksesibilitas; (8) bantuan dan dukungan sosial; (9) bimbingan resosialisasi; (10) bimbingan lanjutan; dan/atau (11) rujukan.

**b. Jaminan sosial**

Jaminan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir untuk memastikan seluruh masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Tujuan dari jaminan sosial adalah: (1) memberikan perlindungan kepada orang miskin, anak yatim piatu yang terlantar, lanjut usia yang terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, serta mereka yang memiliki keduanya, dan mantan penderita penyakit kronis yang menghadapi masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi, agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi; dan (2) memberikan penghargaan kepada para pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas kontribusi mereka.

. Jaminan sosial diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan. Asuransi kesejahteraan

sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.

**c. Pemberdayaan sosial**

Pemberdayaan sosial mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang menghadapi masalah sosial. Tujuan utama pemberdayaan sosial adalah: (1) memberdayakan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menghadapi tantangan kesejahteraan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan mereka; dan (2) meningkatkan partisipasi lembaga dan/atau individu sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**d. Perlindungan sosial**

Perlindungan sosial mencakup berbagai upaya untuk mengurangi dan mengelola risiko yang disebabkan oleh guncangan dan kerentanan sosial. Tujuan perlindungan sosial adalah untuk mencegah dan mengatasi risiko yang muncul akibat guncangan serta kerentanan sosial pada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar minimum mereka. Perlindungan sosial diberikan melalui berbagai saluran seperti Bantuan Sosial, Advokasi Sosial, dan Bantuan Hukum.

**e. Program Kesejahteraan Sosial**

Mengacu kepada perspektif De Guzman (1992), program kesejahteraan sosial biasanya meliputi tiga jenis kategori program, yakni:

- a. Jaminan sosial (Social security), serangkaian tindakan wajib

yang dilembagakan untuk melindungi individu dan keluarganya dari konsekuensi gangguan yang tidak dapat dihindari;

- b. Layanan sosial pribadi (Personal social services), fungsi layanan yang memiliki pengaruh besar pada masalah pribadi, situasi stres individu, bantuan interpersonal atau membantu orang yang membutuhkan, dan penyediaan kerjasama langsung dengan pekerja oleh pemerintah dan lembaga sukarela; dan
- c. Bantuan Umum (Public Assistance), bantuan material yang biasanya diberikan oleh instansi pemerintah kepada orang-orang yang tidak memiliki penghasilan atau sarana penunjang bagi dirinya dan keluarganya.

#### **E. Gambaran Umum Aisyiyah**

Pada 27 Rajab 1335 H/19 Mei 1335/19 Mei 1917 di dirikannya Aisyiyah dalam perhelatan akbar dan mulia bertepatan dengan momentum istra Mi'raj Nabi Muhammad. Awal berdirinya Aisyiyah dimulai sejak adanya perkumpulan Sapa Tresna di tahun 1014, yakni perkumpulan bagi gadis-gadis terdidik di sekitar kauman. Konstruksi sosial pada saat itu mengatakan bahwa Perempuan tidak perlu menempuh Pendidikan secara formal, namun KH Ahmad Dahlan sebaliknya, mendorong anak gadis disekitar rekan atau saudara teman-temannya di kauman untuk bersekolah. Akhirnya para gadis-gadis inilah yang kemudian mengenyam perkaderan KH Ahmad Dahlan juga temannya, serta Nyai Walidah atau Siti Walidah..

Pendirian 'Aisyiyah dimulai dari sebuah pertemuan yang diadakan di

rumah Kyai Dahlan pada tahun 1917. Pertemuan tersebut dihadiri oleh K.H. Dahlan, K.H. Fachroedin, K.H. Mochtar, Ki Bagus Hadikusumo, serta enam gadis yang merupakan kader Dahlan, yaitu Siti Bariyah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busjro, Siti Wadingah, dan Siti Badilah. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan untuk mendirikan organisasi perempuan Muhammadiyah dan disepakati nama 'Aisyiyah yang diusulkan oleh K.H. Fachroedin. Nama tersebut terinspirasi dari istri Nabi Muhammad, 'Aisyah, yang dikenal cerdas dan kompeten. Jika Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad, maka 'Aisyiyah berarti pengikut 'Aisyah. Keduanya diharapkan menjadi pasangan yang harmonis dalam dakwah, sebagaimana figur Muhammad dan 'Aisyah, di mana 'Aisyiyah akan berjuang bersama Muhammadiyah. Harapannya, profil 'Aisyah dapat mencerminkan sifat dan semangat dari anggota-anggota 'Aisyiyah.

Dahlan pernah memberikan pesan kepada sahabat dan murid-muridnya untuk berhati-hati dalam menangani urusan 'Aisyiyah. Beliau meyakini bahwa jika dapat membimbing dengan baik, insya Allah 'Aisyiyah akan menjadi teman setia dalam perjuangan Muhammadiyah. Sebanyak sembilan perempuan terpilih untuk memulai kepemimpinan perdana 'Aisyiyah. Siti Bariyah dipercaya sebagai Ketua pertama 'Aisyiyah, sementara delapan pengurus lainnya adalah Siti Badilah sebagai Sekretaris, Siti Aminah sebagai Bendahara, dan Ny. H. Abdullah, Ny. Fatimah Wasaal, Siti Dalalah, Siti Wadingah, Siti Dawimah, dan Siti Busyro sebagai Pembantu.

Pemilihan Siti Bariyah sebagai ketua pertama, yang merupakan salah satu kader terbaik Dahlan, menunjukkan keberhasilan dalam proses kaderisasi yang dilakukan oleh Dahlan, istrinya, serta sahabat dan muridnya. Banyak

yang mengira bahwa Nyai Dahlan adalah pemimpin pertama organisasi 'Aisyiyah. Namun, istri Ahmad Dahlan lebih berperan sebagai sosok pembimbing bagi 'Aisyiyah yang masih muda pada waktu itu.

Salah satu ayat yang senantiasa digadag-gadag oleh pegiat 'Aisyiyah, yaitu: “kaum Islam laki-laki dan kaum Islam isteri sebagian menolong sebagiannya, sama menyeru dengan kebaikan dan melarang daripada kejelekan.” Ayat tersebut menjadi landasan teologis yang mengisyaratkan bahwa kewajiban amr ma'ruf nahi mungkar tidak memandang jenis kelamin. Di tengah anutan doktrin bahwa “perempuan itu swarga nunut neraka katut” dan perempuan tidak perlu bermasyarakat tapi cukup di rumah saja, 'Aisyiyah justru menggiatkan diri berdakwah di ruang kemasyarakatan.

Islam berkemajuan, yang tercermin dalam penafsiran Muhammadiyah-'Aisyiyah terhadap ayat Al-Qur'an yang tidak membedakan jenis kelamin dalam dakwah, menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah-'Aisyiyah. Pemahaman tentang Islam berkemajuan dan pentingnya pendidikan bagi gerakan ini menghasilkan berbagai pembaruan dalam kegiatan yang mereka lakukan, seperti inisiatif mendirikan pendidikan anak usia dini di Indonesia dengan nama Frobel School pada tahun 1919, yang kini dikenal sebagai TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA), pendidikan keaksaraan, pendirian mushola perempuan pada tahun 1922, kongres bayi (baby show), dan berbagai kegiatan inovatif lainnya.

Untuk menyebarkan ide-ide mengenai pembaruan dan upaya meningkatkan derajat perempuan, baik di internal maupun eksternal, 'Aisyiyah menerbitkan majalah organisasi bernama Suara 'Aisyiyah pada tahun 1926. Sebagai organisasi perempuan yang muncul pada awal pergerakan

dan memiliki visi persatuan pergerakan perempuan, 'Aisyiyah berperan aktif dalam penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia I serta menginisiasi pendirian Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Saat ini, 'Aisyiyah telah mencapai usia seratus tahun, yang berarti organisasi ini telah menjalani perjalanan panjang dan memainkan peran penting dalam aspek keummatan dan kebangsaan selama dua abad. Usia yang panjang ini menunjukkan keteguhan sebuah organisasi. Semangat pembaruan yang berlandaskan pada paham Islam berkemajuan akan terus menjadi penerang bagi 'Aisyiyah (Aisyiyah, 2023).

## **F. Konsep Risalah Perempuan Berkemajuan**

Penyusunan Risalah Perempuan Berkemajuan memiliki konsep, tujuan, pendekatan, dan nilai dasar tertentu yang menjadi landasan pemikirannya. Hal ini mencerminkan kerangka berpikir yang solid, terstruktur, dan relevan sebagai inti pemikiran tentang perempuan berkemajuan dalam perspektif Islam, yang menjadi dasar dan wawasan yang diadopsi oleh 'Aisyiyah sebagai organisasi yang merumuskannya untuk kepentingan bersama, terutama dunia perempuan di tengah perubahan zaman.

Risalah Perempuan Berkemajuan bertujuan sebagai dasar, petunjuk, dan pedoman bagi setiap perempuan. Diharapkan perempuan dapat menjadi lebih maju dan berperan aktif dalam menggerakkan organisasi perempuan. Mereka diharapkan mampu menggali potensi dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dapat mewujudkan peradaban yang maju, tercerahkan, dan berwawasan rahmatan lil-'alamin.

### **a. Konsep Risalah Perempuan Berkemajuan**

Risalah, yang berasal dari bahasa Arab, memiliki akar kata rasila-

yarsalu-rasalan dan Ar-risālah yang berarti surat, kerasulan, atau risalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, risalah diartikan sebagai 1) sesuatu yang dikirimkan (seperti surat dan sejenisnya); 2) surat edaran (selebaran); 3) karangan singkat mengenai suatu topik dalam ilmu pengetahuan; 4) laporan rapat atau notula. Dalam konteks naskah ini, risalah merujuk pada rumusan singkat yang berisi pokok-pokok pikiran tentang misi perempuan yang berlandaskan nilai-nilai ajaran Islam dan ajaran Nabi dalam menghadapi perubahan zaman yang terus berkembang.

Risalah Perempuan Berkemajuan adalah sebuah dokumen yang mencerminkan pandangan ideologis dari persyarikatan 'Aisyiyah-Muhammadiyah mengenai perempuan dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Dokumen ini menambah kekayaan pandangan ideologis yang telah ada dalam persyarikatan terkait perempuan dalam perspektif Islam. Pandangan ideologis yang dimaksud antara lain: *Tuntunan Mencapai Esteri Islam Yang Berarti*, Keputusan Kongres 'Aisyiyah ke-26 tahun 1939 di Yogyakarta; *Adabul Mar'ah fil Islām*, Keputusan Muktamar Tarjih ke-17 tahun 1972 di Wiradesa, Pekalongan; *Fikih Perempuan*, Keputusan Munas Tarjih ke-26 tahun 2010 di Malang; serta *Islam Berkemajuan dan Gerakan Pencerahan*, dalam Pernyataan.

Beberapa pandangan ideologis lainnya yang dimiliki oleh Muhammadiyah dan 'Aisyiyah antara lain: *Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua*, Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah pada tahun 2010 di Yogyakarta; *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Keputusan Munas Tarjih ke-28 pada tahun 2014 di Palembang; *Pokok-pokok Pikiran 'Aisyiyah Abad Kedua*, Keputusan Muktamar Abad Kedua 'Aisyiyah ke-47 pada tahun 2015 di Makassar; *Risalah Pencerahan*, Keputusan Tanwir Muhammadiyah pada tahun

2019 di Kota Bengkulu; serta *Fatwa-fatwa Tarjih tentang Perempuan*.

Risalah ini menyajikan rumusan konseptual mengenai makna dan karakter perempuan berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer dari perspektif Islam, yang menjadi pandangan keagamaan dalam Muhammadiyah, khususnya terkait perempuan. Islam berkemajuan adalah Islam yang menumbuhkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis untuk seluruh umat manusia. Islam yang menghormati martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa adanya diskriminasi. Islam yang mengusung misi untuk melawan perang, terorisme, kekerasan, penindasan, keterbelakangan, serta segala bentuk kerusakan di bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, dan berbagai kemungkaran yang merusak kehidupan.

Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi.

**b. Tujuan**

Risalah Perempuan Berkemajuan bertujuan sebagai pedoman dan arah bagi dua kelompok sasaran. Pertama, untuk setiap individu perempuan yang diharapkan dapat menjadi perempuan yang maju dalam menjalani kehidupannya, selaras dengan nilai-nilai keagamaan yang bersifat moderat dan berkemajuan. Kedua, sebagai pedoman dan arah bagi para penggerak organisasi dalam memperkuat dan memberdayakan perempuan, serta mengembangkan gerakan perempuan yang berkemajuan.

Risalah Perempuan Berkemajuan juga memiliki tujuan untuk menjadi

rujukan yang mengandung pemahaman Islam Berkemajuan dengan perspektif wasatiyah (moderat, tengah) tentang perempuan dalam gagasan, pemikiran, dan aksi gerakan, yang menawarkan alternatif pemikiran di tengah berbagai aliran dan gerakan. Selain itu, Risalah Perempuan Berkemajuan dapat menjadi landasan pemikiran dalam mengembangkan potensi, keilmuan, dan keberagaman perempuan untuk memperkuat peran-peran keagamaan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal dalam mewujudkan peradaban yang rahmatan lil-ā‘lamīn.

Dengan adanya Risalah Perempuan Berkemajuan, setiap pihak dapat memperluas wawasan pemikiran sebagai panduan, arahan, dan orientasi tindakan mengenai bagaimana perempuan menjalankan perannya dalam kehidupan yang multidimensi, yang saling terhubung dalam satu kesatuan hidup atau ekosistem, termasuk dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat tengahan (wasatiyah, moderat) dan terintegrasi satu sama lain untuk membangun kehidupan bersama yang “hayātan thayyibatan” atau kehidupan yang baik [QS. al- Nahl (16) : 97].

#### **G. Relevansi kesejahteraan social dengan penerapan risalah perempuan berkemajuan.**

Dari kajian konsep kesejahteraan social dapat ditarik keterkaitan mengenai kesejahteraan social yang diartikan bahwa sebuah gagasan, yakni gagasan untuk menjadikan kehidupan masyarakat yang lebih layak yang menyediakan kesempatan kerja dan makna kemanusiaan, memberikan keamanan dan perlindungan dari segala ancaman keamanan, mempromosikan keadilan dan adanya jaminan kehidupan ekonomi produktif dan stabil bagi individu. Dalam menciptakan kondisi yang

sejahtera perlunya masyarakat yang berdaya. Sehingga melalui risalah perempuan berkemajuan yang dirumuskan oleh organisasi Aisyiyah dapat dijadikan oleh insan perempuan dalam bertindak maupun dijadikan acuan maupun pedoman dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan perempuan-perempuan berkemajuan. Dalam artian perempuan dikatakan berkemajuan jika alam pikiran dan kondisi kehidupan perempuan yang maju dalam segala aspek kehidupan tanpa mengalami hambatan dan diskriminasi baik secara structural maupun kultural yang sejalan dengan islam.

Peneliti menggunakan konsep perempuan berkemajuan berdasarkan keputusan Muhammadiyah di Muktamar Aisyiyah terbaru tahun 2022 untuk melihat bagaimana Langkah Pimpinan Wilayah Aisyiyah Jawa Timur dalam menerjemahkan di teritorialnya. Peneliti juga menggunakan konsep yang relevan dengan Kesejahteraan social untuk mengukur keterkaitan dalam penerapan risalah Gerakan perempuan berkemajuan dengan Kesejahteraan social.